



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 166 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga berwenang untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 138 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut KPA Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja, KPA Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- c. menetapkan panitia/ pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Khusus kepada:

1. KPA Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga, personel Kelompok Kerja Pemilihan, dan personel pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. menetapkan personel Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - c. menyusun standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan.
2. KPA Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU LPDUK atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan keluaran *output* yang ditetapkan;
  - c. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksana anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, KPA Kemenpora bertanggungjawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

- KELIMA : Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Kesekretariatan dan Satuan Kerja BLU LPDUK ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, KPA Kemenpora menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEDELAPAN : Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 138 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 138 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



S A N U S I

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 166 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KPA
1.	Sri Wahyuni, ST., MSc 197109071996032001	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418135)
2.	Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A. 197605312000121002	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418137)
3.	Dr. Raden Isnanta, M.Pd. 196510111991121001	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418138)
4.	Drs. Rudy Sufahriadi 196508232023211001	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418139)
5.	Dr. Surono, S.Pd.,M.Pd 197005141998031002	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418140)

6.	Ferdinand Kamariki Tangkudung, SH 198703132010121003	Analisis Hukum Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BLU Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (Kode: 499962)
----	--	--	---

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO